



GOVERNOR LAMPUNG

**GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 26 /B.05/HK/2019**

ABOUT

**APPOINTMENT OF AUTHORITY OF BUDGET (KPA), OFFICIAL COMMITMENT (PPK), OFFICIAL SIGNATURE OF ORDER TO PAY (PPSPM), AND HEAD OF EXPENDITURE BUDGET REVENUE AND
STATE EXPENDITURE (APBN)/DECONCENTRATION IN THE PROVINCE OF LAMPUNG YEAR BUDGET 2019**

GOVERNOR LAMPUNG,

- Memorandum :** Letter from the Director of Labor and Transmigration Province of Lampung Number : 900/6010/V.07/01/2018 dated 28 December 2018 Regarding the Appointment of Financial Fund Manager of Decentralization TA. 2019 Disnakertrans Province of Lampung;
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8 dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun DIPA;
- b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dalam bentuk petunjuk operasional kegiatan (POK);
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang :
- a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan Kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran;
 - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
- KEEMPAT : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang :
- a. menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung;
 - b. menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
- a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;

- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KEENAM : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 1 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 29 /B.05/HK/2019
 TANGGAL : 7 JANUARI 2019

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-067.07.3.418245/2019 05-12-2018	(067) (07) (12) (418245)	-	591.032.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
1.1.	SP DIPA-067.07.3.418245/2019 05-12-2018	067.07.10	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	591.032.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Bambang Joko Dwi Sunarto, SH, MH NIP 19620205 198601 1 003 Pembina (IV/a)	Suhayano, SE NIP. 19640115 198303 1 001 Penata Tk. I (III/d)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
1.1.1.	SP DIPA-067.07.3.418245/2018 05-12-2017	067.07.10. 5505	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	198.757.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Bambang Joko Dwi Sunarto, SH, MH NIP 19620205 198601 1 003 Pembina (IV/a)	Suhayano, SE NIP. 19640115 198303 1 001 Penata Tk. I (III/d)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
1.1.2	SP DIPA-067.07.3.418245/2018 05-12-2017	067.07.10 5506	Penataan Persebaran Penduduk	392.275.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Bambang Joko Dwi Sunarto, SH, MH NIP 19620205 198601 1 003 Pembina (IV/a)	Suhayano, SE NIP. 19640115 198303 1 001 Penata Tk. I (III/d)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.	SP DIPA-026.05.3.129011/2019 05-12-2018	(026) (05) (12) (129011)	-	699.684.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	SP DIPA-026.05.3. 129011/2019 05-12-2018	026.05.08	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	699.684.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Yenni Afriani, SH, MM NIP 19650101 199003 2 012 Pembina (IV/a)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Meice Roslina, SE, MM NIP. 19760512 200701 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1.1.	SP DIPA-026.05.3. 129011/2019 05-12-2018	026.05.08 2179	Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industri	296.000.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Yenni Afriani, SH, MM NIP 19650101 199003 2 012 Pembina (IV/a)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Meice Roslina, SE, MM NIP. 19760512 200701 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1.2	SP DIPA-026.05.3. 129011/2019 05-12-2018	026.05.08. 2181	Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	98.000.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Yenni Afriani, SH, MM NIP 19650101 199003 2 012 Pembina (IV/a)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Meice Roslina, SE, MM NIP. 19760512 200701 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2.1.3	SP DIPA-026.05.3. 129011/2019 05-12-2018	026.05.08. 2182	Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi	144.164.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Yenni Afriani, SH, MM NIP 19650101 199003 2 012 Pembina (IV/a)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Meice Roslina, SE, MM NIP. 19760512 200701 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4	SP DIPA-026.05.3. 129011/2019 05-12-2018	026.05.08. 2183	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	161.520.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Yenni Afriani, SH, MM NIP 19650101 199003 2 012 Pembina (IV/a)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Meice Roslina, SE, MM NIP. 19760512 200701 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.	SP DIPA-026.08.3. 129014/2019 05-12-2018	(026) (08) (12) (129014)	-	995.658.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.1.	SP DIPA-026.08.3. 129014/2019 05-12-2018	026.08.09	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	995.658.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Yenni Afriani, SH, MM NIP 19650101 199003 2 012 Pembina (IV/a)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Meice Roslina, SE, MM NIP. 19760512 200701 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.1	SP DIPA-026.08.3. 129014/2019 05-12-2018	026.08.09. 2197	Peningkatan Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan	256.782.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Yenni Afriani, SH, MM NIP 19650101 199003 2 012 Pembina (IV/a)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Meice Roslina, SE, MM NIP. 19760512 200701 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.1.2	SP DIPA-026.08.3. 129014/2019 05-12-2018	026.08.09. 2199	Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	191.927.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Yenni Afriani, SH, MM NIP 19650101 199003 2 012 Pembina (IV/a)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Meice Roslina, SE, MM NIP. 19760512 200701 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.1.3	SP DIPA-026.08.3. 129014/2019 05-12-2018	026.08.09. 2200	Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	261.415.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Yenni Afriani, SH, MM NIP 19650101 199003 2 012 Pembina (IV/a)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Meice Roslina, SE, MM NIP. 19760512 200701 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3.1.4	SP DIPA-026.08.3. 129014/2019 05-12-2018	026.08.09. 2201	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	285.534.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Yenni Afriani, SH, MM NIP 19650101 199003 2 012 Pembina (IV/a)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Meice Roslina, SE, MM NIP. 19760512 200701 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.	SP DIPA-026.13.3. 129015/2019 05-12-2018	(026) (13) (12) (129015)	-	6.418.362.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.	SP DIPA-026.13.3. 129015/2019 05-12-2018	026.13.06	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	6.418.362.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anhar Parinduri, AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.1	SP DIPA-026.13.3. 129015/2019 05-12-2018	026.13.06. 2217	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas.	98.300.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anhar Parinduri, AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.2	SP DIPA-026.13.3. 129015/2019 05-12-2018	026.13.06. 2218	Pengembangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri.	2.576.400.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anhar Parinduri, AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.3	SP DIPA-026.13.3. 129015/2019 05-12-2018	026.13.06. 2220	Pengembangan dan Peningkatan Produktifitas	678.465.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anhar Parinduri,AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
	SP DIPA-026.13.3. 129015/2019 05-12-2018	026.13.06. 2221	Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	421.972.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anhar Parinduri,AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.4	SP DIPA-026.13.3. 129015/2019 05-12-2018	026.13.06 4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Binalatnas	1.289.197.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anhar Parinduri,AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
4.1.4	SP DIPA-026.13.3. 129015/2019 05-12-2018	026.13.06 4059	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Binalattas	1.354.028.000,-	Ir. Lukmansyah, MM NIP 19601109 198503 1004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anhar Parinduri,AP, M.Si NIP 19730923 199402 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Drs. Lukman, MM NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	E. Siti Murwani, SE NIP. 19650418 199103 2 003 Penata (III/c)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO